

Judul : Jelang Ramadhan, komisi IV harap nelayan dapat bantuan khusus
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jelang Ramadhan Komisi IV Harap Nelayan Dapat Bantuan Khusus

WAKIL Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta pemerintah memastikan kebijakan pangan dan kelautan benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan itu khususnya kepada nelayan kecil serta masyarakat korban bencana menjelang Ramadan 2026.

Permintaan itu disampaikan Alex saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Alex mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan "hadiah lebaran" kepada nelayan kecil melalui kebijakan Vessel Monitoring System (VMS).

"Output dari kebijakan VMS ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ayo kita kembalikan sebagian PNBP yang telah berhasil diperoleh di tahun 2025 lalu untuk bantuan VMS bagi nelayan kecil kita," ungkap Alex, Rabu (4/2/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, VMS merupakan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit yang wajib dipasang pada kapal berizin pusat, umumnya kapal di atas 30 GT atau kapal eks-daerah yang bermigrasi. Sistem ini berfungsi melacak posisi dan aktivitas kapal secara *real-time*, meningkatkan keselamatan melalui fitur alarm, efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan berkelanjutan.

Hingga April 2025, tercatat sekitar 8.893 kapal telah ter-

pasang VMS dari total 13.313 unit kapal yang mengantongi izin pemerintah pusat. Alex pun mengapresiasi langkah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menggaransi percepatan perizinan bagi pengusaha perikanan yang akan memasang VMS.

"Dengan semakin banyaknya nelayan yang menggunakan VMS, tentunya akan menambah potensi pemasukan negara dari sektor ikan tangkap," ungkap Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat (Sumbar).

Alex juga menyoroti kebijakan pangan, khususnya pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026. Ditegaskan, GPM harus menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana, terutama bencana hidrometeorologi di wilayah Sumbar, Sumut, dan Aceh.

"Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Tolonglah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka," tegas Alex.

Pernyataan tersebut disampaikan Alex merespons rencana ID Food menggelar GPM di 420 titik di seluruh Indonesia guna mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan 2026. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, GPM hanya akan digelar di dua titik di Aceh, empat titik di Sumut, dan sembilan titik di Sumbar. ■ BYU